

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TERJADINYA
SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN ANGGARAN PADA PEMERINTAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN ANGGARAN 2019-2023**



DIAJUKAN OLEH:

NAMA : YULIA INDAH PRATIWI

NIM : 126231030

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI AKUNTAN

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS TARUMANAGARA

JAKARTA

2024

LAPORAN TUGAS AKHIR

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TERJADINYA
SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN ANGGARAN PADA PEMERINTAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN ANGGARAN 2019-2023**



DIAJUKAN OLEH:

**NAMA : YULIA INDAH PRATIWI
NIM : 126231030**

**UNTUK MEMENUHI SALAH SATU SYARAT
UNTUK KELULUSAN PADA PROGRAM STUDI
PENDIDIKAN PROFESI AKUNTAN**

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI AKUNTAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA**

2024

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TERJADINYA
SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN ANGGARAN PADA PEMERINTAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN ANGGARAN 2019-2023**

Laporan Tugas Akhir

Disusun Oleh:



Yulia Indah Pratiwi

126231030

Disetujui Oleh:

Pembimbing



Sriwati, S.E., M.Ak., Ak., CA

ABSTRAK

Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat melaporkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) pada Tahun Anggaran (TA) 2019 s.d. 2021 dan TA 2023 serta Sisa Kurang Perhitungan Anggaran (SiKPA) pada TA 2022. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar perencanaan anggaran surplus atau defisit, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya SiLPA/SiKPA, serta pengaruh SiLPA/SiKPA terhadap perencanaan anggaran pada tahun anggaran berikutnya. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif kualitatif, dengan sumber data primer melalui wawancara dan data sekunder diperoleh dari Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat TA 2019 s.d. 2023. Analisis data yang digunakan yaitu analisis data interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang mempengaruhi perencanaan anggaran surplus atau defisit pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) meliputi kondisi ekonomi dan sosial, insentif fiskal daerah, serta kurang salur dan keterlambatan Dana Bagi Hasil (DBH). SiLPA pada TA 2019 s.d. 2020 dan 2023 dipengaruhi oleh pelampauan pendapatan, efisiensi belanja, dan penerimaan pinjaman, sementara SiKPA pada TA 2022 disebabkan oleh tidak tersalurkannya DBH Provinsi dan kendala penyerapan pendapatan. Penurunan SiLPA pada TA 2021 terjadi karena tidak adanya realisasi pinjaman daerah. SiLPA/SiKPA mempengaruhi perencanaan anggaran tahun berikutnya, yakni digunakan dalam APBD Perubahan dengan fokus pada belanja publik, infrastruktur, dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Kata Kunci: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), Sisa Kurang Perhitungan Anggaran (SiKPA), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

ABSTRACT

The Regional Government of Tulang Bawang Barat reported a Budget Surplus (SiLPA) for Fiscal Years (FY) 2019 to 2021 and 2023, as well as a Budget Deficit (SiKPA) for FY 2022. This study aims to analyze the basis of surplus or deficit budget planning, the factors causing SiLPA/SiKPA, and the influence of SiLPA/SiKPA on budget planning for subsequent fiscal years. The research employs a qualitative descriptive method, utilizing primary data obtained through interviews and secondary data derived from The Audit Board of The Republic of Indonesia (BPK) Audit Reports on the Financial Statements of Tulang Bawang Barat Regency for FY 2019 to 2023. Data analysis was conducted using interactive data analysis techniques. The findings indicate that factors influencing surplus or deficit budget planning in the Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD) include economic and social conditions, regional fiscal incentives, as well as under-disbursement and delays in Revenue Sharing Funds (DBH). SiLPA in FY 2019 to 2020 and 2023 was influenced by revenue overachievement, spending efficiency, and loan receipts, while SiKPA in FY 2022 resulted from the non-disbursement of provincial DBH and revenue absorption constraints. The decline in SiLPA in FY 2021 occurred due to the absence of regional loan realization. SiLPA/SiKPA affects the following year's budget planning, in the Revised APBD with a focus on public spending, infrastructure development, and increasing Local Own-Source Revenue (PAD).

Keywords: Budget Surplus, Budget Deficit, Local Government Budget

KATA PENGANTAR

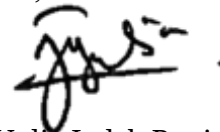
Segala puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan lancar. Tugas akhir ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dari Program Studi Pendidikan Profesi Akuntan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara.

Dalam proses penyusunan laporan tugas akhir ini, peneliti memperoleh dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, peneliti ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam membantu penyusunan tugas akhir ini, di antaranya:

1. Keluarga yang telah memberikan doa dan dukungan penuh selama proses perkuliahan ini.
2. Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.Kn., M.M. selaku Rektor Universitas Tarumanagara.
3. Dr. Sawidji Widoatmojo, S.E., M.M., M.B.A. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara.
4. Dr. Jamaludin Iskak, SE, MSi, Ak., CA, CPA, CPI, ASEAN CPA selaku Ketua Program Studi PPAk FEB Universitas Tarumanagara.
5. Sriwati, S.E., M.Ak., Ak., CA selaku Dosen Pembimbing yang telah membantu serta telah meluangkan waktunya untuk membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
6. Seluruh dosen, staf, dan karyawan di PPA FEB Universitas Tarumanagara yang telah membantu selama proses perkuliahan ini.
7. Teman-teman dan sahabat yang telah memberikan semangat dan dukungan dalam menyelesaikan perkuliahan dan penulisan tugas akhir ini.

Selain itu, penulis berharap bahwa tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dari berbagai latar belakang. Penulis juga ingin menyampaikan permohonan maaf apabila terdapat kesalahan yang terjadi selama proses penyusunan tugas akhir.

Jakarta, 17 Desember 2024



Yulia Indah Pratiwi

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah	5
1.3. Tujuan Penelitian.....	5
1.4. Manfaat Penelitian.....	6
1.5. Sistematika Pembahasan	6
BAB II LANDASAN TEORI	7
2.1. Pengelolaan Keuangan Daerah.....	7
2.2. Laporan Realisasi Anggaran.....	10
2.3. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih.....	13
BAB III METODE PENELITIAN	14
3.1. Objek Penelitian	14
3.2. Metode Penelitian.....	15
BAB IV HASIL DAN BAHASAN	18
4.1. Komponen Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran TA 2019 s.d. 2023	18
4.1.1. Pendapatan Daerah – LRA TA 2019 s.d. 2023	18
4.1.2. Belanja dan Transfer TA 2019 s.d. 2023.....	22
4.1.3. Surplus/(Defisit) TA 2019 s.d. 2023	27
4.1.4. Pembiayaan TA 2019 s.d. 2023.....	28
4.1.5. SiLPA/(SiKPA) TA 2019 s.d. 2023	31
4.2. Perencanaan Anggaran Surplus dan Defisit	31
4.3. Analisis Faktor Internal dan Eksternal yang Mempengaruhi Terjadinya SILPA atau SiKPA	33
4.4. Pengaruh SiLPA atau SiKPA terhadap Perencanaan Anggaran	35

BAB V	SIMPULAN DAN SARAN.....	36
5.1.	Simpulan.....	36
5.2.	Saran.....	37
DAFTAR PUSTAKA		38
LAMPIRAN		39

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Tren SiLPA/(SiKPA) pada Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat TA 2019 s.d. 2023.....	2
Tabel 2.	Tren Surplus/(Defisit) pada Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat TA 2019 s.d. 2023.....	3
Tabel 3.	Tren Opini LKPD Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat	4
Tabel 4.	Perbandingan Realisasi Pendapatan dan Belanja	14
Tabel 5.	Gambaran Umum Komponen SiLPA atau SiKPA TA 2019 s.d. 2023	18
Tabel 6.	Penyebab SiLPA/(SiKPA) Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat TA 2019 s.d. TA 2023	34

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Tren SiLPA/(SiKPA) pada Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat TA 2019 s.d. 2023.....	2
Gambar 2.	Surplus/(Defisit) pada Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat TA 2019 s.d. 2023.....	3
Gambar 3.	Perhitungan SiLPA/SiKPA.....	12
Gambar 4.	Analisis Data Interaktif	16
Gambar 5.	Tren Anggaran dan Realisasi PAD TA 2019 s.d. 2023.....	20
Gambar 6.	Tren Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer TA 2019 s.d. 2023	21
Gambar 7.	Tren Anggaran dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah TA 2019 s.d. 2023.....	22
Gambar 8.	Tren Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi TA 2019 s.d. 2023 .	23
Gambar 9.	Tren Anggaran dan Realisasi Belanja Modal TA 2019 s.d. 2023 ...	25
Gambar 10.	Tren Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Terduga TA 2019 s.d. 2023	26
Gambar 11.	Tren Anggaran dan Realisasi Belanja Transfer TA 2019 s.d. 2023	26
Gambar 12.	Tren Anggaran dan Realisasi Surplus/(Defisit) TA 2019 s.d. 2023	27
Gambar 13.	Tren Perbandingan Realisasi Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Surplus/(Defisit) TA 2019 s.d. 2023.....	28
Gambar 14.	Tren Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Neto TA 2019 s.d. 2023	29
Gambar 15.	Tren Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pembiayaan TA 2019 s.d. 2023.....	30
Gambar 16.	Tren Anggaran dan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan.....	30
Gambar 17.	Tren SiLPA/(SiKPA) TA 2019 s.d. 2023.....	31

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Surat Keterangan Penelitian
- Lampiran 2 Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat TA 2019 s.d. 2023
- Lampiran 3 Berita Acara Permintaan Keterangan terkait SiLPA/SiKPA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia telah menerapkan sistem otonomi daerah. Undang-undang yang mengamatkan otonomi daerah di Indonesia telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU No. 23 Tahun 2014). Berdasarkan Pasal 1 angka 6 UU No. 23 Tahun 2014, yang dimaksud dengan otonomi daerah yaitu hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut undang-undang ini, otonomi daerah meliputi berbagai aspek, termasuk kewenangan untuk membuat peraturan daerah, mengelola keuangan dan sumber daya alam, serta menyelenggarakan pelayanan publik di berbagai bidang seperti pendidikan dan kesehatan. Lebih lanjut, dalam undang-undang tersebut, disebutkan bahwa pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan pengelolaan keuangan daerah secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Pengelolaan keuangan daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 mengatur tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pengelolaan keuangan daerah merupakan elemen penting dalam tata kelola pemerintahan yang baik yang dapat memenuhi kebutuhan pembangunan, menyediakan layanan publik, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Melalui pengelolaan keuangan yang efektif, pemerintah daerah dapat melaksanakan anggaran secara efisien, akuntabel, dan transparan serta dapat membantu untuk menjaga keseimbangan fiskal daerah. Pengelolaan keuangan daerah juga mempengaruhi Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran.

Berdasarkan PSAP 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran, Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran adalah selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBN/APBD selama satu periode pelaporan. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) mengindikasikan adanya kelebihan dana yang belum dipakai. SiLPA dapat terbentuk karena adanya efisiensi pengeluaran atau adanya program-program yang tidak

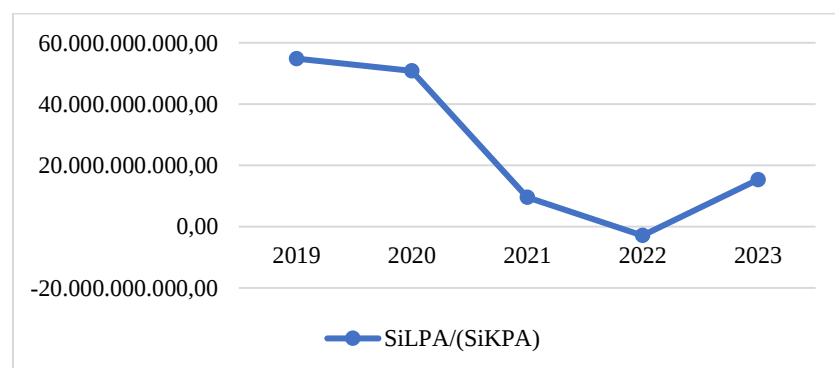
terlaksana. Di sisi lain Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran (SiKPA) mengindikasikan adanya kekurangan dana. SiKPA dapat terbentuk karena tidak tercapainya target anggaran pendapatan atau realisasi belanja melebihi anggaran. Baik SiLPA maupun SiKPA memiliki dampak signifikan terhadap perencanaan penganggaran dan kebijakan fiskal pemerintah. Jika SiLPA terlalu besar, maka dapat mengindikasikan kurang optimalnya pengelolaan keuangan pada pemerintah. Sementara SiKPA yang terlalu besar dapat mengindikasikan penurunan kinerja fiskal pemerintah.

Pada Tahun Anggaran (TA) 2023, Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat membukukan SiLPA sebesar Rp15.316.217.175,91. Jika dilihat dari lima tahun anggaran terakhir, SiLPA Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat mengalami fluktuasi. Tabel 1 menunjukkan rincian SiLPA dan SiKPA berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2019 s.d. 2023 sedangkan Gambar 1 menunjukkan tren dari SiLPA dan SiKPA pada Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat TA 2019 s.d. 2023.

Tabel 1. Tren SiLPA/(SiKPA) pada Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat TA 2019 s.d. 2023

Tahun Anggaran	SiLPA/(SiKPA) (Rp)
2019	54.835.632.263,62
2020	50.849.035.830,42
2021	9.604.754.217,45
2022	(2.908.736.002,73)
2023	15.316.217.175,91

(Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat TA 2019 s.d. 2023 - *Audited*)



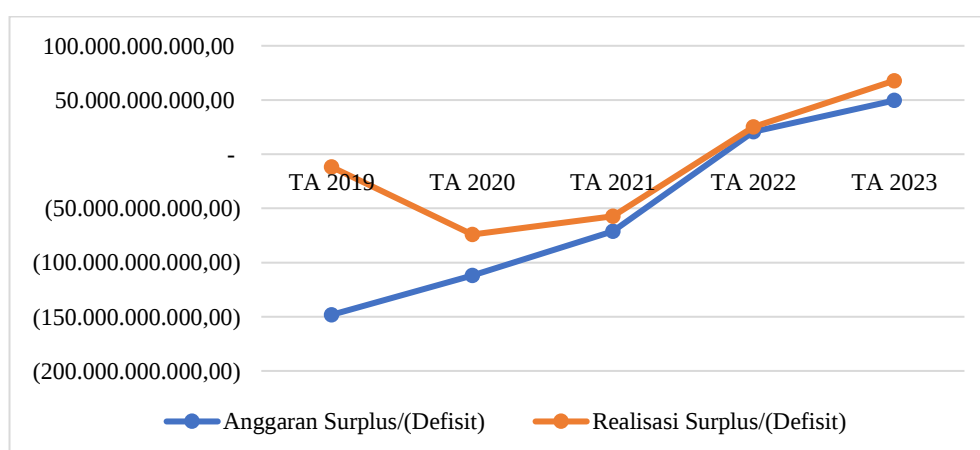
Gambar 1. Tren SiLPA/(SiKPA) pada Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat TA 2019 s.d. 2023

Berdasarkan Gambar 1, diketahui bahwa pada SiLPA dari TA 2019 s.d. 2022 mengalami penurunan signifikan. Puncaknya yakni pada TA 2022, Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang membukukan SiKPA sebesar Rp2.908.736.002,73. Kemudian, pada TA 2023, terdapat peningkatan keuangan daerah sehingga menghasilkan SiLPA sebesar Rp15.316.217.175,91 atau meningkat sebesar Rp18.224.953.178,64 ($\text{Rp15.316.217.175,91} + \text{Rp2.908.736.002,73}$) dari TA 2022. Jika dilihat dari anggaran dan realisasi surplus atau defisit pada TA 2019 s.d. 2023, pada TA 2019 s.d. 2021 mengalami defisit anggaran, sedangkan TA 2022 dan TA 2023 mengalami surplus anggaran. Lebih lanjut, pada TA 2022, Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat membukukan realisasi surplus sebesar Rp25.258.811.037,59, sedangkan pada TA tersebut, terdapat SiKPA sebesar Rp2.908.736.002,73. Adapun tren surplus dan defisit TA 2019 s.d. 2023 terdapat pada Tabel 2 berikut.

Tabel 2. Tren Surplus/(Defisit) pada Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat TA 2019 s.d. 2023

Tahun Anggaran	Anggaran Surplus/(Defisit) (Rp)	Realisasi Surplus/(Defisit) (Rp)
2019	(148.221.361.790,00)	(11.694.338.425,64)
2020	(111.783.253.091,62)	(74.118.611.984,50)
2021	(71.052.521.830,42)	(57.166.805.064,97)
2022	20.711.039.215,55	25.258.811.037,59
2023	49.489.206.017,73	67.774.622.947,58

(Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat TA 2019 s.d. 2023 - *Audited*)



Gambar 2. Surplus/(Defisit) pada Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat TA 2019 s.d. 2023

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat pada TA 2023 meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian dengan Paragraf Penekanan Suatu Hal. Adapun tren opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Tulang Bawang Barat TA 2019 s.d. 2023 terdapat pada Tabel 3 berikut.

Tabel 3. Tren Opini LKPD Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat TA 2019 s.d. 2023

Tahun Anggaran	Opini
2019	Wajar Tanpa Pengecualian
2020	Wajar Tanpa Pengecualian
2021	Wajar Tanpa Pengecualian dengan Paragraf Penekanan Suatu Hal
2022	Wajar Tanpa Pengecualian dengan Paragraf Penekanan Suatu Hal
2023	Wajar Tanpa Pengecualian dengan Paragraf Penekanan Suatu Hal

Berdasarkan Tabel 3 tersebut, pada umumnya Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat berhasil memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian pada TA 2019 s.d. 2023. Namun, meskipun pencapaian ini menunjukkan kinerja yang baik dalam hal pelaporan keuangan, memahami faktor-faktor yang mempengaruhi SiLPA dan SiKPA merupakan hal yang penting untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan anggaran daerah serta memastikan keberlanjutan pembangunan daerah. Oleh karena itu, kajian untuk mengidentifikasi penyebab terjadinya SiLPA dan SiKPA diperlukan. Analisis ini dapat membantu pemerintah daerah menyusun strategi yang lebih efektif dalam mengelola anggaran di masa mendatang sehingga capaian pembangunan dapat dioptimalkan.

Penelitian ini memperhatikan penelitian terlebih dahulu yang dilakukan oleh Amelia dan Khoiriawati (2022) dengan judul Analisis SiLPA Sebagai Alat Ukur Pengelolaan APBD pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar dan Safitri, dkk. (2022) dengan judul Analisis Penyebab dan Dampak Adanya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Pemerintah Kabupaten Bondowoso. Adapun hasil dari penelitian Amelia dan Khoiriawati (2022) tersebut yaitu Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar menunjukkan kinerja pengelolaan APBD yang kurang optimal dalam pencapaian pendapatan daerah, dengan target yang hanya tercapai pada 2019, namun berhasil mencapai efisiensi belanja. Penyebab utama SiLPA adalah efisiensi belanja, sehingga diperlukan peningkatan realisasi belanja untuk

memaksimalkan serapan anggaran dan menyelesaikan program yang belum terlaksana. Selanjutnya, penelitian Safitri, dkk. (2022) menyimpulkan bahwa defisit anggaran di Kabupaten Bondowoso terjadi akibat total belanja yang melebihi pendapatan serta adanya SiLPA yang harus diserap, dengan SiLPA dipengaruhi oleh pelampauan pendapatan dan sisa anggaran belanja yang berdampak pada anggaran tahun berikutnya. Pemerintah Kabupaten Bondowoso perlu mengelola penggunaan SiLPA secara tepat agar tidak menghambat pencapaian target kinerja. Penelitian ini menguatkan temuan Amelia dan Khoiriawati (2022) serta Safitri, dkk. (2022) dengan menganalisis dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya SiLPA dan SiKPA pada Kabupaten Tulang Bawang Barat selama TA 2019-2023. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan strategi pengelolaan anggaran yang lebih efektif bagi pemerintah daerah dalam memastikan keberlanjutan pembangunan serta optimalisasi capaian pembangunan di masa mendatang.

1.2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dari penelitian ini antara lain:

- a. Apa yang mendasari perencanaan anggaran surplus atau defisit pada Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat TA 2019 s.d. 2023?
- b. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya SiLPA atau SiKPA pada Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat TA 2019 s.d. 2023?
- c. Bagaimana pengaruh SiLPA atau SiKPA pada Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat terhadap perencanaan anggaran pada tahun anggaran berikutnya?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini antara lain:

- a. Untuk menganalisis dasar perencanaan anggaran surplus atau defisit pada Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat TA 2019 s.d. 2023;
- b. Untuk menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya SiLPA dan SiKPA pada Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat TA 2019 s.d. 2023;
- c. Untuk menganalisis pengaruh SiLPA dan SiKPA pada Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat terhadap perencanaan anggaran pada tahun anggaran berikutnya.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini antara lain:

a. Bagi Pemerintah Daerah

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk menyusun kebijakan terkait alokasi APBD dan pengendalian keuangan daerah sehingga anggaran dapat dikelola dengan lebih efektif dan efisien.

b. Bagi Pemeriksa/Auditor

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk menyusun prosedur pemeriksaan tambahan atas APBD pada Pemerintah Daerah.

1.5. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

a. Bab I Pendahuluan

Bab ini memaparkan mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penelitian.

b. Bab II Landasan Teori

Bab ini menjelaskan mengenai teori yang mendasari penelitian ini seperti Pengelolaan Keuangan Daerah, Laporan Realisasi Anggaran, dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih.

c. Bab III Metode Penelitian

Bab ini memaparkan mengenai metode yang digunakan dalam penelitian ini, seperti objek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan metode pengujian data.

d. Bab IV Hasil dan Pembahasan

Bab ini memaparkan dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran pada objek penelitian.

e. Bab V Simpulan dan Saran

Bab ini memaparkan kesimpulan, keterbatasan penelitian, dan rekomendasi berdasarkan hasil penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Amelia, F., & Khoiriawati, N. (2022). Analisis SiLPA Sebagai Alat Ukur Pengelolaan APBD pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar. *Al-Muhasib: Journal of Islamic Accounting and Finance*, 1-20.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2024). Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2023 (Nomor 30A/LHP/XVIII.BLP/05/2024). Bandar Lampung: BPK RI.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2023). Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2022 (Nomor 36A/LHP/XVIII.BLP/05/2023). Bandar Lampung: BPK RI.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2022). Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2021 (Nomor 23A/LHP/XVIII.BLP/05/2022). Bandar Lampung: BPK RI.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2021). Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2020 (Nomor 24A/LHP/XVIII.BLP/04/2021). Bandar Lampung: BPK RI.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2020). Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2019 (Nomor 27A/LHP/XVIII.BLP/06/2020). Bandar Lampung: BPK RI.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Method Source Book (3rd ed.)*. Thousand Oaks, California: SAGE Publications.
- Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat. (n.d.). *Sejarah Tubaba*. Diakses dari Tubaba.go.id: <https://tubaba.go.id/sejarah>
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Ratmono, D., & Sholihin, M. (2023). *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Safitri, S. S., Kartika, Andriana, & Santoso, A. B. (2022). Analisis Penyebab dan Dampak Adanya Sisa Lebih Perhitungan. *e-Journal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi*, 110-115.
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2016). *Research Methods for Business: A Skill-Building Approach (7th ed.)*. Chichester, West Sussex: John Wiley & Sons.
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.